

ASPIRASI *kita*

Edisi 11
November
2025



**PKS SETUJU APBD JATIM 2026,
NAMUN LAYANGKAN CATATAN
KRITIS: FISKAL TERTEKAN,
PANGAN HARUS JADI PRIORITAS**



PKS SETUJU APBD JATIM 2026, NAMUN LAYANGKAN CATATAN KRITIS: FISKAL TERTEKAN, PANGAN HARUS JADI PRIORITAS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Meski menyatakan setuju, PKS menegaskan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung efektif di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemangkasan besar-besaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. "Situasi fiskal sedang berat, terutama setelah adanya pemangkasan TKD. Namun pembahasan tetap berjalan kondusif," ujar Lilik yang bertindak sebagai juru bicara fraksi.

Dalam pembahasan final, pendapatan daerah 2026 disepakati turun dari Rp28,26 triliun menjadi Rp26,30 triliun, atau merosot 6,94 persen. Penurunan terbesar berasal dari berkurangnya TKD, khususnya Dana Transfer Umum. Belanja daerah juga ikut turun dari Rp29,65 triliun menjadi Rp27,21 triliun. Dengan kondisi ini, defisit Rp916,73 miliar akan ditutup menggunakan pembiayaan netto dari SILPA 2025.

A photograph of Lilik Hendarwati, the Chairwoman of the PKS Fraksi in the DPRD of East Java, speaking at a wooden podium. She is wearing a light-colored hijab and a matching top. A microphone is positioned in front of her, and a small lamp is attached to the podium. The background is slightly blurred, showing a white cloth on the left and a dark wall on the right.

"Situasi fiskal sedang berat, terutama setelah adanya pemangkasan TKD. Namun pembahasan tetap berjalan kondusif."


PKS mendorong pemerintah provinsi lebih agresif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan tata kelola BUMD, optimalisasi pemanfaatan aset, penyelesaian aset idle. Target opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga dinilai masih terlalu rendah. Karena itu, PKS meminta kolaborasi lebih kuat dengan aparat penegak hukum agar intensifikasi pajak berjalan optimal.

“Insentif pajak bagi masyarakat rentan tetap harus dipertahankan,” tegas Lilik. Pemangkasan TKD yang mencapai Rp205 triliun secara nasional, dan Rp2,8 triliun untuk Jawa Timur, menjadi sorotan utama PKS. Lilik menegaskan bahwa kondisi fiskal ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan dasar. Fraksi PKS mendesak pemerintah provinsi memastikan pendidikan 20 persen, belanja kesehatan meningkat, infrastruktur publik minimal 40 persen.

PKS juga menekankan pentingnya menjaga kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui beasiswa, layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga bantuan sosial produktif. Meski anggaran terpangkas, PKS meminta agar sektor infrastruktur tetap berjalan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan, penguatan irigasi, fasilitas pelabuhan, sarana pendidikan, dan pengembangan layanan Trans Jatim di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura.

Mengacu pada tema RKPD 2026, PKS menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Program seperti Jatim Agro, Jatim Sejahtera, dan Jatim Kerja disebut harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Setelah menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui pengesahan Raperda APBD Jatim 2026 menjadi Peraturan Daerah. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS mendukung dan menyetujui pengesahan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026,” tutup Lilik.

***“Dengan mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS
mendukung dan menyetujui pengesahan
Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2026.”***



FRAKSI PKS JATIM DORONG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN, AGUS CAH: RAPERDA HARUS LINDUNGI ALAM DAN MASYARAKAT

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (6/11/2025). Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, yang bertindak sebagai juru bicara. Dalam penyampaian, pria yang kerap dipanggil Agus Cah ini menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengajukan Raperda tersebut beserta naskah akademiknya.

Menurutnya, pengajuan Raperda ini merupakan langkah penting dan strategis di tengah dinamika empiris dan yuridis terkait pengelolaan kehutanan di daerah. "Hutan Jawa Timur seluas sekitar 1,36 juta hektare memiliki fungsi strategis sebagai penyangga kehidupan, sumber ekonomi, dan pelindung lingkungan. Namun tekanan akibat konversi lahan, perambahan, dan degradasi lingkungan telah menurunkan daya dukung ekosistem serta meningkatkan konflik tenurial," ujar Agus.

Fraksi PKS menilai, regulasi kehutanan daerah yang selama ini berlaku, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2003, Perda Nomor 6 Tahun 2005, dan Perda Nomor 12 Tahun 2007, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi nasional seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Agus menegaskan bahwa Raperda ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan, meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, serta mendukung tata kelola kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis terhadap isi Raperda. Di antaranya, potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam hal izin usaha kehutanan, reklamasi, dan konservasi alam.

“Perlu kejelasan batas koordinasi dan harmonisasi agar tidak terjadi konflik implementasi dengan regulasi pusat, seperti PP No. 23/2021 dan Permen LHK No. 7/2021,” jelasnya. Fraksi PKS juga menyoroti lemahnya aturan terkait alih fungsi hutan lindung dan konservasi. Mereka menilai perlu adanya ketentuan yang tegas untuk mencegah perambahan dan alih fungsi menjadi perkebunan, permukiman, atau industri wisata yang merusak alam.

“Kami mendorong adanya moratorium alih fungsi hutan serta audit kehutanan secara menyeluruh untuk mencegah bencana banjir dan longsor akibat kerusakan hutan di Jawa Timur,” tegas Agus. Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar kewenangan Gubernur dalam mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan, terutama untuk proyek strategis nasional, dibatasi secara jelas agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kebijakan.

Dalam hal pemanfaatan hutan lestari, Fraksi PKS mendukung ketentuan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pemanfaatan hutan, disertai pembinaan dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kelestarian hutan. “Kami mendorong Pemprov melakukan blacklist bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Agus Cah.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya konservasi alam di luar kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, serta perlunya pengelolaan hutan mangrove yang komprehensif karena banyak kawasan pesisir Jawa Timur terancam alih fungsi menjadi kawasan industri.

Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan agar Raperda memuat ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kehutanan untuk membantu pemulihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Tak hanya itu, perlindungan tenaga kerja sektor kehutanan juga mendapat perhatian Fraksi PKS. Mereka mendorong agar pekerja di sektor kehutanan dan masyarakat pengelola perhutanan sosial dijamin keselamatannya melalui jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan pembinaan K3.

Dalam aspek ekonomi, Fraksi PKS meminta adanya fasilitasi untuk usaha mikro dan kecil pengolah hasil hutan bukan kayu (HHBK) agar mendapat akses promosi dan pasar, baik domestik maupun ekspor.

Terakhir, Fraksi PKS menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan kehutanan antara pemerintah provinsi dan pelaku usaha agar pengawasan publik dan DPRD terhadap pengelolaan hutan dapat berjalan efektif.

Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung pengajuan Raperda Penyelenggaraan Kehutanan dan berharap pembahasan selanjutnya dilakukan secara lebih cermat dan partisipatif, melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

“Semoga Raperda ini menghasilkan kebijakan kehutanan yang berpihak pada rakyat, menjaga kelestarian alam, dan membawa keberkahan bagi Jawa Timur,” tutupnya.



“Raperda ini jangan hanya sekadar memenuhi amanah yuridis, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya agar tata kelola kehutanan di Jawa Timur bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.”

FRAKSI PKS SOROTI DARURAT JUDI ONLINE & PINJOL ILEGAL DALAM TANGGAPAN RAPERDA KETERTIBAN UMUM: USULKAN EDUKASI GEN Z HINGGA KONSELOR KELUARGA



Ancaman judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi perhatian utama Fraksi PKS DPRD Jawa Timur saat menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jatim terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Harisandi Savari, dalam Rapat Paripurna pada Selasa (25/11/2025).

Harisandi menegaskan bahwa gangguan di ruang digital telah memasuki tahap darurat, khususnya judi online dan pinjol ilegal yang telah menelan banyak korban, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja. "Persetujuan gubernur untuk memasukkan ruang digital sebagai bagian dari gangguan ketertiban umum adalah langkah penting. Ini menjadi dasar sinergi Pemprov dan DPRD untuk menangani darurat pinjol dan judi online," tegasnya.

Fraksi PKS bahkan mengusulkan perluasan strategi pencegahan tidak hanya melalui relawan digital, tetapi juga menasar generasi muda yang menjadi target utama platform ilegal tersebut.

“Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Kami usulkan edukasi khusus di sekolah menengah, kampus, hingga pesantren. Generasi Z harus dibekali literasi digital agar tidak menjadi korban,” ujar Harisandi. Selain itu, Fraksi PKS mendorong pembentukan konselor pencegahan pinjol dan judi online berbasis keluarga, mengingat banyak kasus bermuara pada kondisi psikologis dan tekanan ekonomi keluarga. Menindaklanjuti usulan gubernur, Fraksi PKS meminta sistem rehabilitasi sosial diperkuat dengan kolaborasi lintas profesi dan komunitas.

“Rehabilitasi bagi korban pinjol dan judol harus melibatkan psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan relawan desa. Banyak korban mengalami depresi, tekanan ekonomi, dan krisis keluarga,” jelasnya. Meski perjudian dan pinjol menjadi isu utama, Fraksi PKS juga menanggapi catatan gubernur terkait poin-poin lain dalam Raperda, termasuk penggunaan pengeras suara (sound horeg), keamanan pangan, hingga perlindungan masyarakat rentan.

Soal sound horeg, PKS meminta ukuran objektif batas penggunaan pengeras suara melibatkan ahli kesehatan, ahli bangunan, dan ahli teknologi. “Frekuensi tinggi bukan hanya mengganggu pendengaran, tetapi bisa berdampak pada syaraf, otak, jantung, bahkan konstruksi bangunan,” jelas Harisandi. Terkait pangan berbahaya, PKS sependapat pentingnya memasukkan pasal yang melarang produksi dan peredaran pangan tercemar maupun nonpangan. “Kriteria ilmiah harus jadi dasar.


Pendapat ahli pangan, ahli gizi, ahli kesehatan, dan pakar halal wajib dilibatkan,” tambahnya. Fraksi PKS juga menyoroti perlunya meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, namun dengan mekanisme yang tidak menimbulkan tindakan main hakim sendiri. “Kami usulkan quick response aparat penegak Perda terhadap laporan masyarakat. Kanal pengaduan, termasuk digital, harus aktif dan transparan,” ujar Harisandi.

PKS: Raperda Ini Mendesak di Tengah Lonjakan Gangguan Digital

Mengakhiri penyampaianya, Fraksi PKS menegaskan bahwa perubahan Raperda ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab fenomena sosial yang berkembang cepat, terutama di dunia digital.

“Pembahasan harus cermat dan melibatkan banyak pihak. Kami berharap Perda ini benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman judi online, pinjol ilegal, pangan berbahaya, hingga gangguan ketertiban lainnya,” pungkasnya.

Dengan tambahan pasal-pasal strategis dan mekanisme pencegahan yang menyasar generasi muda, Raperda ini diharapkan menjadi benteng hukum baru bagi masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi maraknya kejahatan digital.

A portrait of a man with dark hair and a beard, wearing a dark suit jacket over a white shirt. He is looking slightly to the right of the camera.

“Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Kami usulkan edukasi khusus di sekolah menengah, kampus, hingga pesantren. Generasi Z harus dibekali literasi digital agar tidak menjadi korban.”

FRAKSI PKS JATIM DESAK PARTISIPASI NYATA DAN ANGGARAN KONKRET UNTUK PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETANI GARAM: TAK CUKUP FGD



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan bagi pembudi daya ikan serta petani garam dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi atas pendapat gubernur terhadap Raperda terkait, Selasa (25/11/2025). Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari.


Harisandi menyebutkan bahwa Fraksi PKS menyambut baik sikap gubernur yang pada prinsipnya menyetujui pengajuan Raperda, sekaligus memberikan lima catatan penting untuk penyempurnaan aturan tersebut. PKS menilai masukan itu menjadi pintu pembahasan yang lebih konstruktif, terutama terkait perlindungan pelaku usaha perikanan dan garam yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Jawa Timur.

Menanggapi masukan gubernur terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya. Bahkan, PKS mendorong keterlibatan masyarakat dilakukan secara meaningful participation, bukan sekadar formalitas. “Pembudidaya ikan dan petani garam tidak cukup hanya hadir di FGD. Mereka harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlindungan dan pemberdayaan,” tegas Harisandi.

Fraksi PKS menekankan, partisipasi harus mencakup proses penyelesaian masalah cepat, seperti saat terjadi lonjakan pasokan dari impor atau provinsi lain, bencana yang mengancam pasokan, maupun dugaan permainan harga. Terkait masukan gubernur soal pendanaan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Fraksi PKS menyatakan sepakat. Namun, PKS menegaskan perlunya porsi anggaran yang nyata dan berdampak langsung.

“APBD harus menyentuh kebutuhan dasar pembudi daya ikan dan petambak garam. Jangan habis untuk acara seremonial,” kata Harisandi. PKS mengusulkan anggaran diarahkan pada pembinaan kelompok, fasilitasi perlindungan usaha, subsidi atau insentif, promosi minapolitan, hingga resi gudang garam sebagai strategi stabilisasi harga.

Menanggapi pendapat gubernur agar kewenangan Pemprov tidak dirinci berlebihan dalam pasal 5, Fraksi PKS memiliki pandangan berbeda. “Kami menilai muatan perda tetap harus menjelaskan rincian kewenangan provinsi, tentunya dengan menyesuaikan UU Perikanan, UU Pemberdayaan Nelayan, UU Pemda, dan UU Cipta Kerja,” jelasnya.



“Pembudidaya ikan dan petani garam tidak cukup hanya hadir di FGD. Mereka harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlindungan dan pemberdayaan.”

PKS memandang rincian tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang tidak tumpang tindih dengan kabupaten/kota maupun pusat. Fraksi PKS mendukung penuh usulan gubernur untuk memasukkan kriteria penggarap lahan dalam Raperda. Menurut PKS, hal ini penting agar regulator tidak hanya melindungi pemilik lahan, tetapi juga penggarap yang bekerja di lapangan.

“Perlindungan dan pemberdayaan harus berlaku untuk pembudi daya ikan skala kecil, penggarap, hingga pemilik lahan. Tidak boleh ada diskriminasi,” ujar Harisandi. PKS menekankan pentingnya pendataan terpadu untuk memastikan tiga segmen ini sama-sama mendapatkan akses program, termasuk pada petambak garam.

Menanggapi masukan mengenai pencantuman definisi pembudi daya ikan, Fraksi PKS menyatakan sependapat. PKS juga siap memperbaiki teknik legal drafting agar tidak tumpang tindih dengan regulasi pusat maupun kabupaten/kota.

“Definisi yang jelas akan menyederhanakan penerapan Perda dan mencegah konflik kewenangan,” kata Harisandi. Menutup penyampaian, Fraksi PKS berharap Raperda ini benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan dan petambak garam di Jawa Timur, dua kelompok yang kerap menghadapi fluktuasi harga, gangguan produksi, dan minimnya akses teknologi.

“Semoga Perda ini menjadi tonggak baru untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan garam. Ini sektor strategis bagi ekonomi Jawa Timur,” pungkas Harisandi. Raperda ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi upaya peningkatan kesejahteraan pesisir dan kemandirian pangan daerah dalam jangka panjang.

Perlindungan dan pemberdayaan harus berlaku untuk pembudi daya ikan skala kecil, penggarap, hingga pemilik lahan. Tidak boleh ada diskriminasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur resmi menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/11/2025).

Melalui juru bicaranya, Harisandi Savari, PKS menyatakan persetujuan atas penetapan Perda baru tersebut, dengan sejumlah catatan penting yang menyoroti aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam penyampaian, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahan Raperda.

PKS menegaskan bahwa Perda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah turunnya kapasitas fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mulai berlaku pada APBN 2026.

FRAKSI PKS SETUJUI PERDA BARU, SOROTI TARIF PARKIR RSUD HINGGA AFIRMASI UNTUK GEN Z



PKS menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran dan tata kelola keuangan yang lebih cermat, produktif, serta berpihak pada masyarakat. Karena itu, PKS menekankan pentingnya pengelolaan pajak dan retribusi yang tidak hanya memenuhi amanah regulasi, tetapi juga peka terhadap kondisi sosiologis dan dinamika ekonomi warga.

Dalam catatan akhirnya, PKS menegaskan bahwa penerapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) harus mengedepankan prinsip keadilan. Artinya, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta mendengar masukan publik, termasuk mempertimbangkan Fatwa MUI 2025 tentang Pajak Berkeadilan.

Terkait perubahan retribusi, PKS secara tegas menolak adanya kenaikan tarif yang berpotensi memberatkan warga. PKS menyatakan siap mengawal munculnya keberatan masyarakat setelah perda diberlakukan, terutama bagi kelompok rentan, kelas menengah ke bawah, maupun komunitas sosial dan generasi muda yang memanfaatkan layanan publik.

Fraksi PKS juga meminta agar Pemprov Jatim mengumumkan secara terbuka setiap perubahan tarif retribusi, khususnya tarif baru yang muncul akibat penambahan layanan BLUD atau optimalisasi tarif lama. Publikasi yang jelas dan disertai infografis dinilai penting untuk mencegah pungli, kelebihan bayar, dan kebingungan masyarakat.

Terkait retribusi parkir di luar badan jalan, khususnya di RSUD dan fasilitas BLUD lainnya, PKS memberikan sorotan khusus. PKS menegaskan bahwa tarif parkir tidak boleh naik drastis dan harus tetap murah sebagai bentuk empati terhadap warga yang sedang menghadapi kondisi kesehatan keluarga.

“Penerapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengedepankan prinsip keadilan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta mendengar masukan publik.”

Selain itu, PKS meminta adanya kebijakan afirmatif bagi pengemudi ojek online, serta memastikan kualitas layanan parkir tetap baik dan ditunjang sistem pembayaran digital yang transparan.

Fraksi PKS juga menyoroti retribusi pada fasilitas olahraga, rekreasi, dan wisata yang dikelola OPD. PKS menekankan perlunya kebijakan afirmatif bagi pelajar, mahasiswa, atlet muda, serta komunitas olahraga non-profit. Penerapan layanan pemesanan fasilitas olahraga secara digital juga dinilai penting untuk memudahkan masyarakat, terutama generasi Z yang sangat akrab dengan layanan online.

Pada retribusi pemanfaatan aset daerah di 29 OPD, PKS meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara orientasi pendapatan dengan fungsi aset untuk kepentingan umum. Transparansi informasi tarif dan layanan pemesanan digital dinilai mampu mengoptimalkan penggunaan aset sekaligus mendorong peningkatan PAD.

PKS juga mengapresiasi dimasukkannya tarif Trans Jatim ke dalam Perda ini sebagai upaya memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik murah. Bahkan PKS mendorong agar bisnis Trans Jatim diperluas, termasuk pengelolaan reklame dan layanan ekspedisi, serta pembentukan BUMD transportasi secara khusus.

Sementara terkait penundaan penghapusan Pajak Alat Berat (PAB), PKS menyatakan dapat memahami keputusan tersebut, dengan catatan bahwa Pemprov Jatim harus segera menyelesaikan pendataan dan pemutakhiran objek PAB untuk memastikan potensi riilnya. Di akhir penyampaian, PKS menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Perda baru ini.

Dengan mengucapkan basmalah, Fraksi PKS berharap Perda tersebut mampu menjadi landasan pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih optimal, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Timur. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, barokah, dan rida-Nya," tutup Harisandi Savari.

"Tarif parkir di RSUD dan BLUD tidak boleh naik drastis dan harus tetap murah sebagai bentuk empati terhadap warga, serta perlu ada kebijakan afirmatif bagi pengemudi ojek online."



Ketua Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)





UMKM SURABAYA NAIK KELAS! LILIK HENDARWATI DAMPINGI PELAKU USAHA URUS NIB GRATIS

Anggota DPRD Jatim dai Dapil Surabaya Lilik Hendarwati kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya melalui program kolaboratif “Saleha Sadar Legalitas Usaha”.

Program ini merupakan suatu gerakan nyata untuk membantu pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, serta memberikan edukasi permodalan dan pendampingan berkelanjutan.

Pada kegiatan yang digelar di Surabaya baru-baru ini, Lilik Hendarwati secara langsung hadir mendampingi para pelaku usaha, membantu proses pendaftaran NIB bersama petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur (DPMPTSP) dan staf dari Bank Jatim.

Ia menyampaikan bahwa legalitas usaha bukan sekadar formalitas, melainkan pintu untuk membuka akses ke pembiayaan, memperluas jaringan, serta meningkatkan kepercayaan pasar.



Ketua Fraksi PKS Jatim itu menyatakan, “Sebagai wakil rakyat, saya meyakini bahwa kekuatan ekonomi Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi justru berakar kuat pada semangat dan ketangguhan para pelaku UMKM.”

Kegiatan ini bukanlah langkah tunggal. Sebelumnya, lebih dari 8.400 pelaku UMKM telah terbantu dalam berbagai bentuk pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas usaha. Lilik secara aktif mendorong pelaku usaha melalui wadah “Dulurnya Bu Lilik” yang memberikan pendampingan – dari pelatihan dasar, bantuan modal, hingga akses jaringan pasar.

Dengan adanya program “Saleha Sadar Legalitas Usaha”, para pelaku UMKM di Surabaya diharapkan dapat naik kelas: dari usaha informal, tanpa legalitas dan akses terbatas, menjadi usaha yang terdaftar secara resmi, memiliki NIB, mampu mengakses pembiayaan bank, dan siap bersaing di era digital dan pasar terbuka.

Lilik menegaskan bahwa sinergi antara DPRD Jatim, DPMPTSP, dan Bank Jatim menjadi kunci keberhasilan program. DPRD Jatim sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan. DPMPTSP sebagai lembaga teknis yang memfasilitasi penerbitan NIB dan legalitas usaha.

Sementara Bank Jatim sebagai lembaga keuangan yang menyambungkan pelaku usaha dengan pembiayaan yang aman dan produktif. “Mari terus bergerak bersama, memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, agar Jawa Timur semakin berdaya, sejahtera, dan berkeadilan untuk semua.”



“Mari terus bergerak bersama, memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, agar Jawa Timur semakin berdaya, sejahtera, dan berkeadilan untuk semua.”

LILIK HENDARWATI GELAR RESES DI TAMBAKSARI, WARGA CURHAT SOAL PAJAK HINGGA SULITNYA AKSES KUR

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 1 Kota Surabaya, Lilik Hendarwati, kembali menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses titik ke-4 yang digelar di Jalan Ploso Timur X, Tambaksari, pada Sabtu (22/11/2025) malam. Sejumlah persoalan publik mengemuka, mulai dari perpajakan, pendidikan, infrastruktur, hingga sulitnya akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Di hadapan warga, Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur itu menjelaskan pentingnya pemahaman yang benar tentang perpajakan. Menurutnya, masyarakat masih banyak yang keliru memahami isu soal pajak gratis, sehingga sebagian berharap pembebasan pajak meskipun secara ekonomi mampu.

“Masyarakat perlu memahami bahwa pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan layanan publik. Karena itu, pajak adalah kewajiban, bukan pilihan,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

Lilik menambahkan, forum reses menjadi ruang penting untuk meluruskan persepsi dan memberikan edukasi terkait peran pajak bagi keberlanjutan program pemerintah.




Di bidang pendidikan, warga juga mengeluhkan mahalanya biaya sekolah sehingga banyak orang tua berupaya memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Namun, Lilik mengingatkan bahwa kapasitas sekolah negeri tetap terbatas.

Selain itu, pelaku UMKM lokal turut menyampaikan keresahannya mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai masih sulit diakses.

“Banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan KUR. Kami akan bantu memfasilitasi mereka untuk bertemu Bank Jatim agar prosesnya lebih mudah dan mereka bisa mendapatkan permodalan,” tegas Lilik.

Dalam kesempatan tersebut, Lilik menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga Surabaya, baik melalui jalur kebijakan maupun dengan menghubungkan masyarakat pada lembaga yang relevan.

Reses ditutup dengan dialog interaktif yang berlangsung hangat, di mana warga berharap kunjungan Lilik dapat membawa solusi nyata bagi berbagai persoalan yang mereka hadapi.



“Banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan KUR. Kami akan bantu memfasilitasi mereka untuk bertemu Bank Jatim agar prosesnya lebih mudah dan mereka bisa mendapatkan permodalan.”



Sekretaris Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**Dr. H. Puguh Wiji
Pamungkas, MM**

KOMISI E

(KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)





PUGUH DPRD JATIM FASILITASI PELATIHAN KERJA, BERHARAP KEMANDIRIAN EKONOMI WARGA KOTA MALANG

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas menggagas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja: Pembuatan Roti dan Kue, yang digelar di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (6/11/2025).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, UPT BLK Singosari, dan Kelurahan Mergosono Kota Malang. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan warga yang antusias belajar keterampilan baru dalam bidang kuliner, khususnya pembuatan roti dan kue, sebagai bekal membuka usaha mandiri.

“Alhamdulillah, saya bahagia bisa menghadiri pembukaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kelurahan Mergosono Kota Malang yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Pemprov Jatim,” Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Politisi muda PKS ini menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari dedikasinya untuk membangun Malang yang mandiri dan berdaya saing. Menurutnya, isu kemandirian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan besar yang harus terus diurai dan diselesaikan secara kolaboratif.



“Menghadirkan berbagai program pelatihan untuk menjadikan semakin banyak potensi lapangan pekerjaan baru, seperti pelatihan yang dilakukan oleh BLK ini, adalah salah satu wujud nyatanya,” ungkap Puguh.

Ia berharap, melalui pelatihan ini masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, khususnya di sektor kuliner yang memiliki pasar luas dan permintaan tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala UPT BLK Singosari, Lurah Mergosono, serta Anggota DPRD Kota Malang, Dr. Indra Permana, yang bersama-sama membuka kegiatan pelatihan.

Puguh menegaskan, DPRD Jawa Timur akan terus mendorong program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan keterampilan warga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Inilah semangat kemandirian ekonomi yang ingin kami tumbuhkan di Malang dan seluruh Jawa Timur,” pungkasnya.



“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Inilah semangat kemandirian ekonomi yang ingin kami tumbuhkan di Malang dan seluruh Jawa Timur.”

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti dua persoalan besar yang disampaikan warga dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat (reses) pada 18 November 2025. Dua isu tersebut adalah amburadulnya data penerima bantuan sosial (bansos) dan semakin mendesaknya penanganan masalah sampah di wilayah Malang Raya.

Puguh mengungkapkan, sejumlah warga yang hadir dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi sosial mengeluhkan persoalan data penerima bansos yang dinilai jauh dari kondisi riil di lapangan. Ada warga yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak terdaftar, sementara sebagian lain yang tidak layak justru masuk dalam daftar penerima.

“Mereka datang dengan membawa fakta lapangan. Ada yang seharusnya menerima bantuan, tetapi karena tidak masuk dalam list, akhirnya tidak mendapatkan. Sebaliknya, ada warga yang semestinya tidak berhak, tetapi justru menerima. Ini yang kemudian menjadi keluhan utama masyarakat,” ujar Puguh.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi data dari DTKS menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Proses ini, menurutnya, harus menjadi momentum untuk melakukan ground checking secara menyeluruh.

“Validasi data harus benar-benar dilakukan sesuai keadaan di lapangan. Agar masyarakat yang memang berhak benar-benar mendapatkan, dan yang tidak berhak tidak menerima. Ini soal keadilan.” tegasnya.

PUGUH DPRD JATIM SERAP ASPIRASI WARGA MALANG RAYA: MINTA VALIDASI DATA BANSOS DAN ATASI KRISIS SAMPAH



Selain persoalan bansos, warga juga menyoroti masalah sampah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Puguh, isu ini muncul kuat dalam dialog karena kondisi pengelolaan sampah di banyak titik sudah mulai berdampak pada kualitas lingkungan.


“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani serius, akan menimbulkan bencana. Kita sudah melihat tanda-tandanya: banjir dan pemandangan ruang kota yang kurang baik karena kurangnya penampungan sampah.” jelasnya.

Puguh menyebut, Malang sebagai kota yang berkembang menuju metropolitan memiliki aktivitas penduduk yang makin tinggi. Hal ini menuntut inovasi dan manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Puguh menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Malang Raya untuk menginisiasi langkah konkret.

“Kami mendorong adanya langkah-langkah taktis dan progresif dalam mengatasi masalah sampah. Salah satunya melalui revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar bisa menjadi sarana pengolahan sampah yang efektif.”

Menurutnya, tanpa terobosan yang serius, persoalan sampah berpotensi menjadi masalah besar yang menghambat perkembangan kota dan mengancam kenyamanan warga. Melalui reses ini, Puguh menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Malang Raya, terutama terkait pemerataan bantuan sosial dan penanganan persoalan lingkungan yang mendesak.



“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani serius, akan menimbulkan bencana. Kita sudah melihat tanda-tandanya: banjir dan pemandangan ruang kota yang kurang baik karena kurangnya penampungan sampah.”



Bendahara Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**HARISANDI SAVARI,
S.PT, ST**

KOMISI D

(PEMBANGUNAN)

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



TRANS LAUT JATIM SIAP MELUNCUR AKHIR NOVEMBER, HARISANSI DPRD JATIM INGATKAN KEBERLANJUTAN LAYANAN JADI KUNCI

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan bersiap meluncurkan layanan Trans Laut Jatim, moda transportasi laut cepat yang akan menghubungkan Probolinggo dengan sejumlah wilayah kepulauan di Madura.

Program yang dijadwalkan beroperasi mulai akhir November 2025 ini disebut sebagai salah satu terobosan besar Pemprov Jatim dalam memperluas konektivitas maritim dan meningkatkan aksesibilitas warga kepulauan. Kapal cepat Trans Laut Jatim akan melayani dua pola rute berbeda. Pada hari kerja (weekday), kapal akan beroperasi di jalur Probolinggo – Gili Ketapang – Gili Mandangin – Pelabuhan Branta.

Sementara pada akhir pekan (weekend), rutenya diperpanjang hingga Gili Iyang dan Kalianget, menyesuaikan tingginya minat wisatawan pada destinasi bahari unggulan tersebut.




Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari, menyambut baik inovasi transportasi laut ini, namun mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya pada peluncuran, melainkan keberlanjutan layanan.

“Jangan sampai putus di tengah jalan. Artinya, bukan hanya peluncuran yang penting, tetapi bagaimana layanan dijalankan secara rutin, reliable, dan terjangkau,” tegas legislator PKS itu.

Ia menekankan bahwa sejumlah kajian teknis dan ekonomi perlu dilakukan secara matang sebelum operasional penuh diberlakukan. Mulai dari penetapan tarif, skema subsidi, kapasitas kapal, standar keamanan, hingga mekanisme operasional harian.

“Program ini tidak boleh hanya bagus di rencana, tetapi harus kuat dalam pelaksanaan. Semua aspek teknis harus dihitung dengan cermat,” ujarnya.

A portrait of Harisandi Savari, a man with short dark hair and a beard, wearing a colorful batik shirt. He is looking slightly to the right.

“Jangan sampai putus di tengah jalan. Artinya, bukan hanya peluncuran yang penting, tetapi bagaimana layanan dijalankan secara rutin, reliable, dan terjangkau.”



DUA SISWA SMPN 1 SURABAYA YANG CIPTAKAN PENDINGIN TANPA LISTRIK BERKUNJUNG, AGUS CAH DAN HARISANDI BERI APRESIASI

Dua siswa SMP Negeri 1 Surabaya, Malovra Divya Artemisia dan Rivano Emeraldy Yusuf, dapat apresiasi dari dua Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, yakni Agus Cahyono dan Harisandi Savari. Apresiasi itu diberikan saat mereka berkunjung ke Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Kamis (6/11/2025).

Prestasi kedua siswa itu membanggakan, keduanya berhasil menjadi finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2025 tingkat nasional, bidang Ilmu Pengetahuan Terapan (IPT). Mereka menciptakan inovasi bertajuk "BIOCOOL-RAYAP: Inovasi Evaporative Cooling Berbasis Biomimikri Sarang Rayap dan Media PU-GO untuk Pendingin Tanpa Listrik di Gili Labak, Madura."

Inovasi tersebut terinspirasi dari cara rayap tropis (*Macrotermes* sp.) menjaga suhu sarangnya agar tetap sejuk tanpa energi listrik. Dengan memanfaatkan struktur ventilasi spiral alami dan material Polyurethane-Graphene Oxide (PU-GO), alat ini mampu menurunkan suhu udara tanpa bantuan kipas atau listrik, serta menggunakan air laut yang difiltrasi langsung dalam sistemnya.

Hasil riset ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Pulau Gili Labak, Sumenep, Madura, yang sering mengalami suhu panas ekstrem hingga 35°C, sementara pasokan listrik hanya tersedia beberapa jam dalam sehari.

Agus Cahyono: Ide Cerdas, Dampak Nyata

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyampaikan apresiasi tinggi atas gagasan dua pelajar muda tersebut. “Alat pendingin yang mudah dibuat, ramah lingkungan, dan bisa mendukung UMKM masyarakat setempat. Ke depan, kami berharap alat BIOCOOL-RAYAP ini bisa dikembangkan dan dinikmati masyarakat luas,” ujarnya. Agus juga menilai inovasi ini menjadi bukti bahwa semangat riset dan kepedulian terhadap lingkungan sudah tumbuh sejak usia sekolah. “Kami bangga anak-anak Surabaya mampu melahirkan ide yang bukan hanya ilmiah, tapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Harisandi: Bukti Anak Muda Jawa Timur Punya Daya Inovasi Tinggi

Sementara itu, Harisandi Savari, Anggota Komisi D DPRD Jatim, juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan keberanian dua siswa tersebut. “Karya ini menunjukkan bahwa anak muda Jawa Timur punya daya inovasi yang luar biasa. Pemerintah daerah harus terus mendukung program riset dan kreativitas pelajar seperti ini,” ujarnya. Harisandi menilai karya BIOCOOL-RAYAP bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk menciptakan solusi atas persoalan sosial dan lingkungan di daerah masing-masing.

Inovasi Lokal, Manfaat Nasional

Dengan dukungan dari guru pembimbing Weka Ardiansyah, serta mentor riset Nadia Riqqah, kedua siswa ini juga mendapat masukan dari dosen Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Diah Mardiana, M.S. (bidang Kimia) dan Dr. Ir. Redi Bintarto, S.T., M.Eng.Pract., IPM. (bidang Teknik Mesin). Kepala SMPN 1 Surabaya, Eko Widayani turut menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian siswanya. Dengan dukungan akademisi dan legislatif daerah, inovasi BIOCOOL-RAYAP menjadi contoh nyata bahwa ide sederhana dari ruang laboratorium sekolah dapat berkembang menjadi solusi nyata bagi krisis iklim dan energi di Indonesia.





Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**H AGUS CAHYONO,
SHI, MHI**

**KOMISI A
(PEMERINTAHAN)**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)**



ENAM JABATAN ESELON II KOSONG, WAKIL KETUA KOMISI A DPRD JATIM AGUS CAH SOROTI LEMAHNYA PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menyoroti serius adanya kekosongan enam jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, kekosongan tersebut tidak seharusnya terjadi karena seluruh data terkait masa kerja dan masa pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tercatat dan dapat diprediksi sejak awal.

“Informasi bahwa ada enam jabatan eselon II yang kosong ini seharusnya tidak terjadi. Data ASN dan pejabat di lingkup Pemprov Jatim itu sudah ada. Kapan pensiun, siapa yang akan purna tugas, semuanya terdeteksi,” ujar legislator PKS itu.

Agus menegaskan bahwa setiap pejabat eselon pasti melalui proses administrasi terkait masa pensiun. Karena itu, ketika ada pejabat yang akan memasuki masa purna tugas, pemerintah mestinya sudah menyiapkan nama-nama pengganti yang memenuhi kriteria.

“Ketika ada pejabat mau pensiun, itu kan sudah terdeteksi sejak lama. Maka calon penggantinya bisa diproyeksikan. Ada banyak pejabat yang memenuhi syarat, dan mereka bisa disiapkan lebih awal untuk mengisi jabatan tersebut,” jelasnya.



Agus juga mengkritisi kebiasaan pemerintah daerah yang terlalu sering mengisi jabatan kosong dengan Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH). Menurutnya, posisi PLT/PLH tidak memiliki kewenangan penuh sehingga dapat berdampak pada efektivitas birokrasi.

“Tradisi mengisi jabatan dengan PLT atau PLH itu berdampak pada kinerja pemerintah Jawa Timur. Beda dengan pejabat yang sudah definitif. PLT punya batasan kewenangan dan biasanya tidak bisa mengambil keputusan strategis,” tegasnya.

Ia menilai kebutuhan pejabat definitif sangat penting untuk menjaga ritme pelayanan publik dan kelancaran roda pemerintahan. Kekosongan yang terlalu lama dapat membuat proses administrasi tersendat dan program berjalan tidak optimal.

Agus berharap enam posisi eselon II yang kosong dapat segera diisi dengan pejabat terbaik melalui mekanisme yang profesional dan transparan.

“Harapan saya, kekosongan ini segera terisi oleh pejabat yang tepat. Semoga prosesnya dipercepat dan dipilih pengganti terbaik yang bisa membantu kelancaran perjalanan Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

Agus menambahkan, DPRD Jatim akan terus melakukan pengawasan agar pengisian jabatan berlangsung sesuai aturan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kekosongan jabatan di level strategis, Agus menegaskan bahwa manajemen kepegawaian harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.



“Apalagi dengan tambahan poin pengawasan tersebut, support anggaran harus ditingkatkan. Bahkan 0,30% itu sebenarnya angka minimal. Kalau masih 0,10% jelas tidak cukup.”



RESES DI LIMA KABUPATEN, AGUS CAH SERAP KELUHAN MASYARAKAT DAPIL IX: INFRASTRUKTUR BURUK HINGGA TURUNNYA DANA DESA

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil IX (meliputi Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi), Agus Cahyono, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat yang ia terima selama pelaksanaan reses masa sidang pada 17–24 November 2025.

Reses tersebut dilaksanakan di lima titik, masing-masing dua titik di Ponorogo, serta masing-masing satu titik di Trenggalek, Pacitan, dan Ngawi. Agus bertemu dengan berbagai segmen masyarakat, mulai dari pengurus lembaga pendidikan, tokoh partai, kepala desa, hingga kelompok masyarakat pesanggem Perhutani.

Dalam salah satu agenda reses yang digelar di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Zahra, Magetan, Agus berdialog dengan sejumlah pengurus yayasan pendidikan, lembaga dakwah, dan organisasi sosial. Mereka menyampaikan kebutuhan mendesak terkait peningkatan fasilitas pendidikan.

“Aspirasi dari kalangan yayasan pendidikan adalah bagaimana mereka mendapatkan bantuan infrastruktur di lingkungan pendidikan. Banyak sarana yang harus diperbaiki maupun dibangun,” ujar legislator PKS itu. Sementara saat pertemuan dengan para pengurus partai di Ponorogo dan Pacitan, muncul dorongan agar pemerintah maupun para wakil rakyat lebih menggalakkan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Harapannya agar masyarakat semakin melek politik, paham berdemokrasi, dan tidak mudah terpengaruh isu-isu liar,” jelasnya.

Pertemuan dengan kepala desa di beberapa titik mengungkapkan keprihatinan mendalam. Menurut Agus, para kepala desa mengeluhkan turunnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bahkan tinggal sekitar 35% dari tahun sebelumnya. "Dengan turunnya dana tersebut, mereka sangat kesulitan melakukan pembangunan. Maka aspirasi mereka, bagaimana wakil rakyat bisa mengadvokasi pembangunan desa melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Timur," kata Agus.

Ia menegaskan, DPRD Jatim perlu mendorong agar skema bantuan keuangan provinsi dapat menyasar desa-desa yang kini tidak mampu membangun karena minimnya anggaran dari pusat. Dalam reses di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Agus bertemu dengan kelompok masyarakat pesanggem, yaitu warga yang menggarap lahan milik Perhutani. Mereka mengeluhkan buruknya infrastruktur di wilayah kerja mereka.

Namun, Agus menjelaskan adanya kendala regulasi. "Mereka mengeluhkan infrastruktur, tetapi karena asetnya milik Perhutani, APBD tidak bisa berkontribusi langsung. Ini menjadi masukan bagi kami untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui DPR RI, agar ada program Kementerian terkait yang bisa menindaklanjuti," terangnya.

Dari seluruh rangkaian reses, keluhan terbesar masyarakat Dapil IX adalah buruknya infrastruktur pedesaan, terutama jalan desa dan akses antarwilayah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh merosotnya DD dan ADD. "Banyak desa di Dapil IX infrastrukturnya masih sangat buruk. Dengan turunnya Dana Desa dan ADD, mereka semakin sulit membangun. Harapan mereka adalah bagaimana kami di DPRD Provinsi bisa memperjuangkan bantuan keuangan desa dari APBD Jatim," jelas Agus.

Di akhir paparannya, Agus berkomitmen memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut di tingkat provinsi dan mendorong sinergi dengan pemerintah pusat. "Semua masukan ini akan kami teruskan dan perjuangkan. Masyarakat butuh percepatan pembangunan, dan tugas kami adalah memastikan aspirasi itu sampai dan diwujudkan," pungkasnya. Reses ini menjadi cerminan bahwa kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, khususnya infrastruktur, masih menjadi pekerjaan besar di wilayah Dapil IX Jawa Timur.



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**DRS. H. M KHUSNUL
KHULUK**

KOMISI B

(PEREKONOMIAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)



DPRD JATIM GODOK PERDA PERLINDUNGAN PETANI GARAM, KHUSNUL: PEMPROV HARUS DAMPINGI DAN HET YANG ADIL

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan swasembada garam untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Timur yang kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Petani Garam.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, menilai potensi garam di Jawa Timur sangat besar dan perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kesejahteraan bagi petani.

“Kalau kita melihat potensi garam di Jawa Timur ini luar biasa. Cuman kalau hanya mengandalkan garam untuk kebutuhan rumah tangga, sepertinya memang berat karena harganya tidak menentu. Begitu musim panen, harga garam sangat-sangat murah dan banyak dipermainkan oleh para tengkulak,” ujar Khusnul.

Legislator PKS itu berharap, kehadiran perda ini nantinya bisa mendorong peran pemerintah untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada petani garam agar hasil produksi mereka memiliki nilai tambah dan layak dikonsumsi masyarakat luas.




“Harapannya nanti ada bimbingan, ada arahan, penyuluhan bagaimana garam petani ini memang layak untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat juga banyak yang menyukai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khusnul menekankan bahwa pemerintah perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) garam agar harga di tingkat petani tidak terus merugikan. “Yang juga tidak kalah pentingnya adalah penentuan HET. Pemerintah harus bisa mengatur harga jual garam ini agar adil bagi petani dan tidak dimainkan oleh tengkulak,” tegasnya.

Selain itu, Anggota DPRD Jarim dari Dapil Lumajang-Jember tersebut juga mendorong penetapan sentra-sentra garam utama di Jawa Timur untuk memperkuat arah pengembangan industri garam lokal.

“Beberapa kabupaten seperti Madura, Gresik, dan Pasuruan itu punya potensi besar dan perlu dipush menjadi sentral garam,” tambahnya.

Khusnul menegaskan, jika perda ini dijalankan dengan serius dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur berpeluang besar menjadi provinsi mandiri di sektor garam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan petani garam di daerah.



“Yang juga tidak kalah pentingnya adalah penentuan HET. Pemerintah harus bisa mengatur harga jual garam ini agar adil bagi petani dan tidak dimainkan oleh tengkulak.”

KHUSNUL KHULUK PUJI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH, AJAK PEMPROV FOKUS PADA PENGUATAN NELAYAN LOKAL

Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk. Ia menilai program ini merupakan terobosan penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjawab berbagai persoalan klasik yang dihadapi nelayan.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat bagus. Jadi bagaimana nanti nelayan ini juga bisa diadvokasi terkait dengan beberapa kebutuhannya, misalnya BBM, juga ketika hasil ikan melimpah, paling nggak ada storage dan seterusnya itu,” ujar Khusnul.

Menurut legislator PKS tersebut, nelayan selama ini sering menghadapi kesulitan, baik saat harga BBM tinggi maupun ketika hasil tangkapan melimpah namun harga ikan anjlok. Karena itu, keberadaan kampung nelayan ini bisa menjadi solusi konkret bila dijalankan dengan strategi pemberdayaan yang tepat.

Khusnul menilai, program ini harus diperluas tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.



“Ketika para nelayan tidak bisa melaut karena cuacanya tidak bagus, maka harus ada pola-pola bagaimana di kampung nelayan ini bisa ada perputaran bisnis juga. Apakah dilakukan oleh nelayan, atau mungkin juga bisa memberikan bekal untuk ibu-ibu nelayan agar tetap bisa bekerja,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi proyek seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan lokal.

“Konsepnya luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan pendampingan kepada para nelayan yang ada di proyek percontohan Kampung Nelayan Merah Putih ini,” tegasnya.

Khusnul mengajak Pemprov Jatim untuk lebih fokus dalam melakukan penguatan kapasitas nelayan lokal, baik melalui pelatihan, akses permodalan, maupun penyediaan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pasar hasil laut.

“Kalau Pemprov serius mendampingi, saya yakin nelayan-nelayan di Jawa Timur akan makin kuat dan sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan nelayan lokal,” pungkasnya.

“Kalau Pemprov serius mendampingi, saya yakin nelayan-nelayan di Jawa Timur akan makin kuat dan sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan nelayan lokal.”



FRAKSI PKS JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)